

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM UPAYA  
PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN MUARO  
JAMBI PROVINSI JAMBI**

Lasma Rensi  
NPP.29.0353

Asdaf Provinsi Jambi Kabupaten Muaro Jambi  
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik

Email : rennsilasma@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Prevention of land and fires is an effort that can be done in forest and land fires that occur in Muaro Jambi Regency. The role of the local government is very much needed, especially the agency responsible for forest and land fires, namely the Regional Disaster Management Agency of Muaro Jambi Regency. **Purpose :** The purpose of this study is to observe the overall role of BPBD in preventing forest and land fires in Muaro Jambi Regency, Jambi Province, the obstacles in its implementation and the efforts that must be made by the Muaro Jambi Regency Government, especially the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in terms of constraints in implementation. **Method:** This research uses qualitative research methods with descriptive methods and inductive approaches. The data collection techniques used are interviews, observation and documentation. This research uses role theory according to Soejono Soekanto. **Result:** The result obtained by the authors in this study indicate that the role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) has been running well but there are still some obstacles in preventing forest and land fires in Muaro Jambi Regency, Jambi Province. **Conclusion:** The role of the Regional Disaster Management Agency in Muaro Jambi Regency in preventing forest and land fires has been going well, but in it there are still several obstacles, namely limited human resources, limited infrastructure, lack of human awareness to protect the surrounding environment. Efforts made by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) are to carry out patrols, socialize and increase the number of personnel in carrying out the main tasks and functions of the BPBD in order to maximize forest and land fire prevention activities.

**Keywords:** : Prevention, forest and land fires, Regional Disaster Management Agency

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pencegahan kebakaran hutan dan lahan merupakan upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi. Peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan khususnya instansi yang bertanggung jawab dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati secara keseluruhan meliputi peran BPBD terhadap upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, kendala dalam pelaksanaannya dan upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menangani kendala dalam pelaksanaannya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif.. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori peran menurut Soejono Soekanto.. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat beberapa hambatan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. **Kesimpulan:** Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Muaro Jambi dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan sudah berjalan dengan baik, namun didalamnya masih terdapat beberapa hambatan yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia, keterbatasan sarana prasarana, kurangnya kesadaran manusia menjaga lingkungan sekitar. Upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yaitu dengan melakukan patroli, sosialisasi dan penambahan jumlah personil dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari BPBD guna memaksimalkan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

**Kata Kunci:** Pencegahan, Kebakaran Hutan dan Lahan, BPBD

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum. Implementasi yang diamanatkan tersebut bertujuan memastikan hak atas perlindungan dan penghidupan terhadap setiap warga negaranya baik perlindungan psikis maupun fisik. Perlindungan yang diberikan pemerintah kepada warga negaranya berupa perlindungan dari berbagai bencana. Menurut UUD Nomor 24 tahun 2007, bencana ialah suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan suatu masyarakat sehingga akan mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kemudian

kerusakan lingkungan ataupun kerugian harta benda dan memberikan dampak psikologis akibat bencana.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2008 pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bertugas memberikan pengarahan bagi penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat dan rehabilitasi. Peraturan kepala BPBD Nomor 3 tahun 2018 tentang tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah sebagai penanggulangan bencana, Aparatur BPBD berupaya melindungi masyarakat dari ancaman dan dampak bencana.

Luas Kawasan hutan Provinsi Jambi menurut Permenhut No.863/MENHUT-II/2014 yaitu 2.098.535 hektar atau 42,98% dari luas daratan 4.882.857 hektar termasuk cagar alam seluas 685.471 hektar, hutan lindung seluas 179,588 hektar, produksi terbatas Luas hutan 258,285 hektar, hutan produksi tetap seluas 963.792 hektar, dan hutan produksi konversi seluas 11.399 hektar dengan total 2.098.535 hektar. Luasnya kawasan hutan berpotensi untuk mengubah kawasan hutan lindung menjadi perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Muaro Jambi.

**Tabel 1.**

Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi

No	Tahun	Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha)
1	2016	8.281,25
2	2017	109,17
3	2018	1.577,75
4	2019	56.593
5	2020	1.002,00

Sumber : sipongi.menlhk.go.id

Berdasarkan data diatas menunjukkan Provinsi Jambi setiap tahunnya mengalami peningkatan Luas wilayah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan akibat aktivitas masyarakat. Provinsi Jambi merupakan Sebagian provinsi di Indonesia mengalami karhutla terparah sepanjang tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, faktanya 98% karhutla diawali oleh aktivitas manusia dengan sengaja membuka lahan pertanian atau ladang berpindah dengan metode dibakar kemudian ditanami tanaman dengan jenis kelapa sawit (BNPB, 2019), sehingga menimbulkan dampak polusi udara.

Berdasarkan data yang dicatat Walhi (2019), 11 kabupaten dan kota pada Provinsi Jambi jumlah kasus kebakaran dengan luas dan dampak yang paling parah adalah pada Kabupaten Muaro Jambi dengan luas 210,70 Ha. Zona perekonomian lumpuh, ± 1. 000 sekolah terpaksa diliburkan, ±63000 jiwa terserang akibat peradangan saluran respirasi yang kronis (ISPA),

hilangnya hutan adat dan kehancuran area yang sangat sungguh-sungguh dan sehingga memunculkan fenomena langit orange dan pergantian guna lahan pada ruang daerah kabupaten. Terdeteksi 35.947 Hotspot di Jambi luas terbakar 182,803,51 Ha, yang paling luas di Kabupaten Muaro Jambi 210,70 Ha.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, salah satunya luas nya kawasan hutan gambut dan lahan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, luasnya lahan gambut dan berdampingan dengan kawasan hutan produksi masyarakat telah kekeringan dan berpotensi mengalami kebakaran, masih banyak masyarakat yang tidak bertanggungjawab dan melakukan ladang berpindah dengan metode dibakar, dan luasnya titik api yang ada di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini juga terpacu dari beberapa penelitian – penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Makky Yahusafat yang berjudul Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kawasan Hutan Gambut Kabupaten Muaro Jambi oleh BPBD Provinsi Jambi berisi tentang belum optimalnya pencegahan dan pengendalian yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Muaro Jambi karena disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia, sarana prasarana dan biaya yang ada, tidak adanya SOP terkait teknis pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zainal Arifin yang berjudul Straregi Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang berisi tentang penerapan strategi Badan PenangBD yang sudah baik dalam melakukan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca bencana, namun masih adanya hambatan yang muncul yaitu minimnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan air serta akses jalan.

## **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini penulis lakukan dengan fokus yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, dimana terdapat beberapa perbedaan berkaitan dengan konteks pembahasan dimana penelitian terdahulu terfokus pada kebijakan dan strategi BPBD dalam pencegahab dab pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang masih terus terjadi di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dengan tujuan untuk mengetahui upaya yang lebih optimal dalam mengurangi bencana kebakaran hutan dan lahan.

## **1.5 Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati secara keseluruhan meliputi peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap upaya yang lebih optimal mengurangi dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, kendala dalam pelaksanaannya dan upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mengatasi kendala yang ada.

## **II. METODE**

Penulis melakukan penelitian mengenai peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto terkait peran yang mana terdapat 2 dimensi didalamnya yaitu hak dan kewajiban. Pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang dikaji dalam pendekatan induktif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dan data sekunder yang merupakan data tidak langsung berupa dokumen, atikel dan dokumen lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive* dan *Snowballe*. Terdapat 9 orang yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Sekretaris BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Muaro Jambi, Staf BPBD Kabupaten Muaro Jambi dan Masyarakat sebanyak 3 orang.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Peran Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan yang Terjadi di Kabupaten Muaro Jambi**

Bencana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi sudah banyak menyebabkan kerugian yang dialami oleh masyarakat sekitaran tempat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Karhutla yang terjadi dipicu oleh berbagai faktor yang terjadi. Pemerintah daerah setempat yang di bawah oleh BPBD selaku badan/lembaga pemerintahan yang mengatasi masalah bencana baik bencana alam maupun non alam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menanggulangi karhutla yang terjadi. Tugas dan fungsi dari peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi dapat mengurangi dampak yang merugikan masyarakat, baik segi kesehatan yang diakibatkan dari kebakaran hutan dan lahan sehingga masyarakat akan lebih sadar bahwa pentingnya untuk melakukan pencegahan karhutla di Kabupaten Muaro Jambi. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Muaro Jambi untuk mencegah

kebakaran hutan dan lahan akan dipengaruhi oleh faktor yang mendukung kegiatan tersebut dan faktor yang penghambat terjalannya kegiatan dari pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

### **3.2 Hak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD ) Kabupaten Muaro Jambi**

#### **1. Ketersediaan Anggaran**

Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan masyarakat. Anggaran memiliki fungsi dalam organisasi sektor public terutama pemerintahan. Ketersediaan anggaran menjadi faktor yang sangat penting dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi.

Budhi Hartono selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muaro Jambi mengungkapkan bahwa:

Anggaran dalam sebuah pelaksanaan kegiatan menjadi dasar untuk terpenuhinya program yang akan direncanakan dan 54 merupakan hal yang terpenting. Apabila anggaran tidak cukup maka pelaksanaan tugas dan fungsi akan menjadi terganggu. Anggaran di BPBD Kabupaten Muaro Jambi sendiri sudah sangat mencukupi baik sebelum maupun saat pandemi.

R. Mawardi selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muaro Jambi mengatakan bahwa bentuk anggaran yang dialihkan karena kebijakan *refocusing* tetapi tidak mengganggu pelaksanaan program. Hanya saja perlu penyesuaian anggaran dalam melakukan kegiatan. Tetapi untuk pencegahan karhutla semua bisa teratasi dengan baik. Penanggulangan bencana menjadi salah satu urusan wajib pelayanan dasar, sehingga seharusnya mendapatkan anggaran yang cukup untuk melaksanakan keseluruhan tugas dan fungsinya.

Sejak dibentuk pada tahun 2009 hingga saat ini, alokasi anggaran mengalami peningkatan dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sementara dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi masih terbatas. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muaro Jambi seiring dengan semakin intensifnya kejadian bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi dalam menjalankan peran yang dilakukan, memerlukan anggaran sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Anggaran mengacu pada perencanaan program yang telah dibentuk. Oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi harus merencanakan program sesuai dengan visi misi, tugas pokok, fungsi sehingga perencanaan anggaran, persetujuan anggaran dari pertanggungjawaban anggaran bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan.

## 2. Ketersediaan Sarana Prasarana

Budhi Hartono selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi mengungkapkan bahwa kami bertugas di lapangan menggunakan alat untuk bekerja, sarana prasaranapun menjadi pendukung agar berjalan lancarnya suatu kegiatan dilapangan. Seperti mobil berisi air yang dipergunakan untuk memadamkan api, namun apabila kondisi dilapangan jalanan sempit kami hanya membawa selang air yang panjang.

R. Mawardi selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muaro Jambi mengatakan bahwa kami memiliki sarana prasarana yang sesuai dengan fungsinya masing-masing, seperti perahu karet untuk patroli apabila banjir, lalu kendaraan roda empat, sepeda motor, tenda posko apabila keadaan masih tidak baik untuk ditinggalkan maka kami akan memasang tenda ditempat, lalu memiliki tenda untuk pengungsi bagi warga yang akan mengungsi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi memiliki sarana dan prasarana yang bertujuan membantu dalam proses pencegahan maupun kegiatan evakuasi dalam proses penanggulangan bencana di lapangan. Sarana prasarana dibutuhkan untuk menimalisir tugas pokok dan fungsi dari peran BPBD berdasarkan kebutuhan dilapangan seperti keadaan bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, angin puting beliung dan keadaan bencana lainnya.

### Tabel 2.

Daftar sarana dan prasarana BPBD Muaro Jambi :

No	Jenis Peralatan	Sumber APBN/APBN/Donasi	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat Ini	
					Jumlah Layak	Jumlah Tidak Layak
1	Dump Truck (Roda 6)	APBD	1	Unit	1	-
2	Mobil Tangki (Roda 6)	APBN	1	Unit	1	-
3	Kendaraan Roda 4	APBD	3	Unit	3	0
4	Kendaraan Roda 4	APBN	2	Unit	1	1
5	Sepeda Motor	APBD	3	Unit	3	-
6	Sepeda Motor	APBN	4	Unit	4	-
7	Kapal Cepat	APBN	1	Unit	1	-
8	Perahu Karet UK 10	APBN	1	Unit	1	-
9	Kapal Viber Tanpa Mesin	APBN	3	Unit	2	1
10	Mesin Perahu	APBN	1	Unit	1	-
11	Tenda Posko	APBN	1	Unit	-	1

12	Tenda Pengungsian	APBN	3	Unit	-	3
13	Tenda Keluarga	APBN	3	Unit	2	1
14	HT	APBN	2	Unit	1	1
15	HT	APBD	6	Unit	4	2

Sumber : BPBD Muaro Jambi

### 3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Budhi Hartono selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi mengungkapkan bahwa kami memiliki 60 personil yang bertugas dikantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tabel 4.4 Daftar Ketersediaan Peralatan BPBD Muaro Jambi 2021 57 sebagian besar personilnya laki-laki, Tim Reaksi Cepat (TRC) kami rata-rata berusia muda karna sebagian besar mereka bergabung saat sudah tamat kuliah.

R. Mawardi selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muaro Jambi mengatakan bahwa:

Anggota personil BPBD Muaro Jambi memiliki peranan mereka masing-masing, bertugas membantu dalam proses sosialisasi pencegahan, berpatroli dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, apabila terjadinya bencana dilapangan personil yang lain tidak berada dikantor saat adanya kejadian maka personil yang berada dikantor akan saling menolong dan bekerjasama membantu dilapangan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi memiliki 60 anggota personil, yang terdiri dari Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kasi Kedaruratan dan Logistik, 8 Staf Pelaksana, 47 Tim Reaksi Cepat (TRC).

### 3.3 Kewajiban Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muaro Jambi

Anari Hasiholan Sitorus selaku seksi kedaruratan dan logistik menyampaikan bahwa :

Tugas pokok dan fungsi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muaro Jambi itu dilaksanakan bersama-sama secara cepat, dikarenakan kurangnya sumber daya manusianya dan kondisi lapangan apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan secara tiba-tiba maka semua tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang ikut bekerjasama turun ke lapangan.

Muhammad Zuhdi selaku seksi pencegahan dan kepsiapsiagaan menyampaikan bahwa :

Tugas dan fungsi kami dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan yaitu dengan sering melakukan patroli dan memberikan saran kepada masyarakat setiap pemilik perkebunan ataupun lahan agar memilik kanal yang mengelilingi perkebunan maupun lahan tersebut untuk mengurangi resiko apabila terjadi kebakaran. Kami pun juga sering

melakukan sosialisasi ke sekolah untuk memberikan pemahaman bagaimana dampak dan resiko jika terjadinya karhutla.

Dalam melaksanakan kewajibannya agar optimalnya peranan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi mereka melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Melakukan patroli dan pengawasan tiap gelombang yang mempunyai jadwal setiap harinya.
- b. Melakukan sosialisasi tiap bulannya dengan pemasangan plang himbauan dilarang membakar hutan dan lahan, sosialisasi tentang bahaya dan dampak kebakaran hutan dan lahan, melakukan kampanye dimedia cetak dan elektronik.
- c. Membuatkan sekat-sekat kanal untuk pengaturan hidrologi air pada lahan gambut, sehingga tanahpun menjadi lembab dan basah dan tidak mudah terbakar terutama pada saat musim kemarau.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi melakukan tugas pokok dan fungsi dalam melakukan pencegahan karhutla dengan memberikan sosialisasi kepada anak sekolah tentang bagaimana pentingnya mencegah kebakaran dan dampak akibat dari kebakaran itu sendiri, BPBD Muaro Jambi juga memiliki jadwal tersendiri dalam melakukan patroli pada saat musim kemarau menekankan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

### **3.4 Kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan**

#### **1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia**

R. Mawardi selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muaro Jambi mengatakan bahwa keterbatasan personil membuat kurang maksimalnya proses memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pencegahan karhutla yang berada di Kabupaten Muaro Jambi, kekurangan personil juga menjadi faktor penghambat dalam proses pemadaman dilapangan, dikarenakan luasnya jangkauan api yang akan dipadamkan.

Muhammad Zuhdi selaku Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan berpendapat bahwa :

Personil yang kurang membuat kami kesulitan dilapangan saat melakukan proses pemadaman api, dan apabila titik api berada jauh dari jalan besar maka sarana dan prasarana tidak bisa masuk, maka diperlukan tenaga personil bekerjasama mengangkut alat pemadaman api. Jika dalam proses pencegahan juga dibutuhkannya personil saat dilakukannya patroli keliling kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan.

Keterbatasan sumber daya manusia ataupun kurangnya personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi menjadi faktor penting dalam proses pemadaman kebakaran dan menjadi faktor penting dalam mensosialisasikan upaya pencegahan karhutla itu sendiri.

## 2. Terbatasnya Sarana Prasarana

Anari Hasiholan selaku Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi menyampaikan bahwa sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam proses pencegahan seperti halnya berpatroli ataupun saat berlangsungnya karhutla, namun sarana personil pada saat pergi menuju titik api membuat personil kesusahan membawa peralatan pemadaman api.

Pradonsyah selaku Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi mengatakan bahwa kondisi jalan yang rusak membuat proses pemadaman menjadi lambat dari seharusnya, saat turun kelapangan banyak suka dukanya saat membawa peralatan ke tempat peristiwa pemadaman api, jalan yang sempit tidak ada lampu jalan.

Sarana dan prasana diperlukan dalam proses upaya pencegahan atau proses pemadaman api dilapangan, namun apabila sarana dan prasana tidak mencukupi maka proses akan menjadi lambat dilakukan.

## 3. Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Muhammad Zuhi selaku Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan berpendapat bahwa saat tahun 2015 kebakaran hutan dan lahan sangat luar biasa di Muaro Jambi dan menyebabkan langit menjadi berwarna orange banyak masyarakat terkena ISPA dan anak sekolah diliburkan akibat dari kebakaran tersebut, mulai dari hal itu membuat masyarakat sadar bagaimana tidak membakar hutan sembarangan disaat musim kemarau.

Dadan Kardana selaku masyarakat desa kecamatan kumpeh uluh menyampaikan bahwa cara pandang dan berfikir masyarakat sudah mulai menyadari betapa pentingnya menjaga lingkungan sekitar, masyarakat juga menghindari membakar hutan dan lahan disaat musim kemarau agar tidak membuat api menyebar begitu besar dan memiliki 70 dampak yang akan mengganggu proses keberlangsungan masyarakat mencari nafkah.

Kesadaran masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga dan melindungi lingkungan dari kebakaran hutan dan lahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pengendalian Karhutla pasal 26 peran serta masyarakat meliputi :

- a. Memberikan informasi dan memberikan laporan mengenai karhutla kepada tim terpadu yang dibentuk pemerintah daerah.
- b. Membentuk kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA).
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **3.5 Upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam Menghadapi Kendala-Kendala yang Dialami Dalam Implementasi Penggunaan Anggaran Hasil *Refocusing* Dalam Akselerasi Penanganan Covid-19 di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi**

#### **1. Melakukan Patroli**

Patroli yang dilakukan BPBD sudah menjadi hal yang sering dilakukan dalam proses penanganan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi, peran patroli yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sangat penting dalam upaya proses pencegahan hal ini dilakukan apabila sudah memasuki musim kemarau dan rawan akan kebakaran hutan dan lahan, patroli dilakukan disekitaran yang menjadi titik rawan api. Hasil pelaksanaan kegiatan patroli lapangan terpadu utk mencegah terjadinya Kebakaran hutan dan lahan sampai dengan pelaksanaan kegiatan berakhir masa waktunya, ada terdapat kejadian kebakaran hutan dan lahan di 2 (dua) Kecamatan/Wilayah antara lain Kecamatan Kumpeh dan Kecamatan Sekernan, semua dapat berhasil dipadamkan oleh Tim Gabungan Patroli dan Masyarakat, Badan Usaha serta Instansi terkait lainnya dan kegiatan berjalan dengan lancar walaupun masih terdapat kekurangan dan keterbatasan jangkauan yang sifatnya memerlukan pemikiran untuk masa yang akan datang. Selama Pelaksanaan Kegiatan Patroli karhutla yang dilaksanakan dari bulan Juni sampai bulan Desember 2021 dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi terdapat beberapa tempat terpantau jumlah Hotspot atau titik api di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dapat teratasi dan ditekan jumlah Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi dalam Wilayah Kabupaten Muaro Jambi, sehingga Kabupaten Muaro Jambi tidak terjadi lagi seperti kebakaran hutan dan lahan pada tahun-tahun yang lalu menjadikan Muaro Jambi Bebas Asap dan Karhutla.

#### **2. Penambahan Jumlah Sumber Daya Manusia**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi masih kekurangan tenaga sehingga peran BPBD Kabupaten Muaro Jambi masih belum optimal dalam menjalankan fungsi utamanya.

Budhi Hartono selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muaro Jambi menyampaikan bahwa BPBD Muaro Jambi memiliki jumlah staf 60 dan kami telah mengajukan proposal kepada Bupati untuk penambahan staf dan kami berharap proposal peningkatan staf dapat diterima sehingga ketika datang untuk menangani kebakaran hutan dan lahan dapat dirasakan dikarenakan kekurangan tenaga.

#### **3. Melaksanakan Sosialisasi**

Sosialisasi dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi, melakukan sosialisasi secara manajerial dan teknis operasional. Sosialisasi juga dilaksanakan di sekolah-sekolah untuk mengingatkan betapa pentingnya mencegah kebakaran hutan dan lahan. Selain sosialisasi disekolah-sekolah BPBD Muaro Jambi juga melaksanakan sosialisasi dipublik seperti:

##### **a. Pemasangan plang himbauan larangan membakar hutan dan lahan**

- b. Kampanye dimedia cetak dan elektronik
  - c. Melakukan pelatihan dan simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan.
4. Penambahan Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan kegiatannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi sangat membutuhkan sarana dan prasarana agar dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Berjuang untuk menanggapi kebakaran hutan dan lahan karena kurangnya peralatan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, perlu dilakukan penambahan jumlah sarana dan prasarana yang masih belum lengkap.

Budhi Hartono selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muaro Jambi mengungkapkan bahwa Peralatan dalam proses penanggulangan bencana sangat diperlukan saat dilapangan apalagi saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan proses pemadaman api membutuhkan peralatan yang banyak, sehingga kami memberikan masukan untuk penambahan peralatan penanggulangan bencana.

R. Mawardi selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muaro Jambi mengatakan bahwa:

Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kabupaten Muaro Jambi setiap tahunnya, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi sedang mencari solusi dan solusi untuk mengatasi kekurangan peralatan tersebut, seperti penambahan sarana dan prasarana 75 wilayah, agar tidak menyebabkan anggota bergerak lamban. Anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Pada tahun 2021, kami mengusulkan kepada BNPB dan pemerintah daerah untuk penambahan peralatan yaitu 40 selang, 3 truk tangki, dan mengusulkan pembangunan tempat penyimpanan peralatan BPBD Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi mengusulkan 40 selang, 3 kendaraan tangka, dan fabrikasi tempat penyimpanan peralatan. Dengan penyerahan peralatan tambahan tersebut, diharapkan kendala yang akan muncul di lapangan dapat diminimalisir dan tugas pokok dan fungsi BPBD dapat berfungsi dengan baik.

### **3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Makky Yahusafat yang berjudul Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kawasan Hutan Gambut Kabupaten Muaro Jambi oleh BPBD Provinsi Jambi berimplikasi pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan gambut di Kabupaten Muaro Jambi. Sedangkan penelitian yang akan diteliti terfokus mengenai peran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi guna mengetahui upaya apa yang menjadi

tujuan utama pemerintah daerah dalam mengurangi tingkat kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan SOP terkait teknis pencegahan kebakaran hutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zainal Arifin yang berjudul Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari Dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang berisi tentang penerapan strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang sudah baik dalam melakukan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca bencana, namun masih adanya hambatan yang muncul yaitu minimnya pemahaman masyarakat dan keterbatasan air serta akses jalan. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu berkaitan dengan peran utama dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi.

#### **IV. KESIMPULAN**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Muaro Jambi dalam upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan setiap indikator peran BPBD dapat dilaksanakan dengan baik dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
2. Kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi diantaranya sebagai berikut :
  - a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia
  - b. Terbatasnya Sarana Prasarana
  - c. Masih kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga lingkungan sekitar
3. Upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi diantaranya sebagai berikut :
  - a. Melakukan Patrol
  - b. Melakukan Sosialisasi
  - c. Menambah jumlah personil dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) guna memaksimalkan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan
  - d. Menambah Saran dan Prasarana

**Keterbatasan Penelitian :** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Soejono Soekanato terkait peran.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*)** : Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan efektivitas pengamanan aset tetap tanah untuk menemukan hasil yang lebih mendalam

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat disampaikan untuk dijadikan sebagai acuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi diantaranya sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi perlu meningkatkan kinerja dalam melaksanakan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar dapat menimalisir dan peran BPBD menjadi optimal.
2. BPBD Kabupaten Muaro Jambi diharapkan dapat menjalankan program yang lebih mendekati dengan masyarakat sehingga kesadaran masyarakat dapat meningkat dan diharapkan mampu menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
3. Peneliti mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut dengan fokus yang serupa namun memakai pendekatan berbeda sehingga dapat menemukan data terbaru dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

#### **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih yang utama ditunjukkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan lahir batin dan kesempatan kepada penulis sehingga mampu untuk melakukan penelitian dengan baik. Kemudian diucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yang senantiasa selalu mendoakan setiap saat. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dalam penulisan. Kepada pihak yang berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis dalam rangka melaksanakan penelitian ini. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.

#### **VI. DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4

UU Nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan kepala BPBD Nomor 3 tahun 2018 tentang tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah sebagai penanggulangan bencana,

Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi

Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi

Permenhut No.863/MENHUT-II/2014

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

'Hadi, Asrori, and Rusman, Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Studi, Grounded Theory, Etnografi, Biografi, Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 2021

Witcher, Barry J, 'Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan', 2020

Laporan Akhir and others, 'Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan Lahan Gambut Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi', November, 2018.

'Muaro Jambi Titik Hotspot Terbanyak, Fachrori Paparkan Ini Di Istana - Dinamika Jambi' <<https://dinamikajambi.com/muaro-jambi-titik-hotspot-terbanyak-fachrori-paparkan-ini-di-istana/>> [accessed 24 September 2021]

Handayani, Linda, 'JIFP (Jurnal Ilmu Fisika Dan Pembelajarannya), Vol. 4, No. 1, Juni 2020, 16 - 20', 4.1 (2020), 16–20